



Islamisasi Pendidikan di Indonesia Melalui Pendidikan Islam

Nizam Zulfa^{1*}, Haifani Hilal²

¹ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

nizampkl21@gmail.com^{1*}, haifanihilal777@gmail.com²

Alamat: Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Korespondensi penulis: nizampkl21@gmail.com

Abstract. *This article examines the history and development of the Islamization of education in Indonesia. This study aims to analyse Islamisation of education through Islamic education by looking at historical data that shape the patterns and characteristics of Islamic education in Indonesia, as well as identifying critical points that influence the direction of its development. The research uses the theory of historical institutionalism. Through a literature study with a qualitative approach, the research reveals that the development of Islamic education in Indonesia followed a strong path dependence pattern, where decisions in the colonial and early independence periods shaped a relatively stable institutional path. The findings show that the process of educational Islamization underwent institutional layering, where new elements were added without completely erasing the old structure. This research contributes to the theoretical understanding of the dynamics of institutional change in the context of Islamic education in Indonesia.*

Keywords: *Islamization, Islamic Education, Indonesia*

Abstrak. Artikel ini mengkaji sejarah dan perkembangan islamisasi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis islamisasi pendidikan melalui pendidikan islam dengan melihat data-data historis yang membentuk pola dan karakteristik pendidikan Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi titik-titik kritis yang mempengaruhi arah perkembangannya. Penelitian menggunakan teori institusionalisme historis. Melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mengikuti pola *path dependence* yang kuat, dimana keputusan-keputusan di masa kolonial dan awal kemerdekaan membentuk jalur institusional yang relatif stabil. Temuan menunjukkan bahwa proses islamisasi pendidikan mengalami *institutional layering*, di mana elemen-elemen baru ditambahkan tanpa sepenuhnya menghapus struktur lama. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang dinamika perubahan institusional dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Islamisasi, Pendidikan Islam, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Islamisasi pendidikan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan keagamaan bangsa (Azra, 1999). Proses ini telah mengalami berbagai fase perkembangan, dari masa pra-kolonial hingga era reformasi, dengan berbagai tantangan dan adaptasi yang menyertainya (Yunus, 1996). Dalam konteks historis, islamisasi pendidikan merupakan manifestasi dari perjuangan panjang umat Islam Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam sistem pendidikan nasional. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren tradisional hingga madrasah modern, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kontribusi unik dalam membentuk lanskap pendidikan nasional.

Ide dasar penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa perkembangan pendidikan

Islam di Indonesia tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh

keputusan-keputusan historis yang membentuk jalur institusional tertentu. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendidikan Islam di Indonesia cenderung berfokus pada aspek normatif dan deskriptif, seperti yang dilakukan oleh Steenbrink (1986) dan Dhofier (1994). Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami aspek kelembagaan dan pedagogis pendidikan Islam, mereka belum sepenuhnya mengeksplorasi dimensi politik dan sosiologis yang memengaruhi trajektori perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan menggunakan perspektif institusionalisme historis untuk menganalisis bagaimana keputusan-keputusan kunci di masa lalu telah membentuk karakteristik dan pola perkembangan pendidikan Islam kontemporer.

Gap penelitian yang ada menunjukkan kurangnya analisis sistematis tentang bagaimana keputusan-keputusan historis membentuk karakteristik dan pola perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Problem akademik yang muncul adalah bagaimana menjelaskan persistensi pola-pola tertentu dalam pendidikan Islam Indonesia, sekaligus perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di era globalisasi, di mana tuntutan untuk mempertahankan identitas keislaman harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Studi-studi terdahulu belum secara komprehensif menganalisis dinamika perubahan institusional ini, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan nasional pasca-reformasi (Abdullah, 2017).

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami dinamika perubahan institusional pendidikan Islam di Indonesia, yang dapat membantu perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif di masa depan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemahaman mendalam tentang pola-pola historis dan institusional ini menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru dalam kajian pendidikan Islam dengan mengintegrasikan analisis institusional ke dalam studi tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik tentang pendidikan Islam, tetapi juga memberikan landasan teoretis yang lebih kuat untuk memahami dinamika perubahan institusional dalam konteks pendidikan keagamaan di Indonesia (Rahman, 2015).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses islamisasi pendidikan di Indonesia melalui perspektif institusionalisme historis, dengan fokus khusus pada bagaimana keputusan-keputusan kunci di masa lalu

telah membentuk karakteristik pendidikan Islam kontemporer. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi pola-pola perubahan institusional dan faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Islamisasi

Islamisasi mengacu pada proses mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai bidang, khususnya sains, untuk menciptakan pengetahuan yang mewujudkan iman, kebaikan, dan keadilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelaraskan praktik ilmiah modern dengan nilai-nilai Islam untuk kepentingan umat manusia (Mely Nadia, 2022). Ia bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan ilmiah dengan misi Islam, pada akhirnya mendorong kemajuan dalam peradaban Islam dan meningkatkan pendidikan Islam (Nugroho & Ramadhan, 2022).

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses penuntun yang bertujuan mengembangkan siswa untuk mencapai kedewasaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menanamkan kesucian, moral, dan kebenaran, sekaligus membentuk individu dengan karakter mulia melalui *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* (Jaohar Tsani & Sauri, 2024). Pendidikan Islam menekankan pengembangan landasan spiritual yang kuat, mendorong kepercayaan kepada Tuhan dan kepatuhan pada perintah-perintah-Nya, yang diterjemahkan ke dalam karakter dan perilaku mulia (Kasman, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen kebijakan, arsip sejarah, dan kajian akademik tentang pendidikan Islam di Indonesia (Mahoney, 2000). Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis institusionalisme historis, yang menekankan pada konsep *path dependence*, *critical junctures*, dan *institutional layering* yang oleh Thelen dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Path dependence* (ketergantungan jalur) mengacu pada bagaimana pilihan kebijakan atau institusional awal menciptakan pola yang bertahan dari waktu ke waktu, sehingga menyulitkan perubahan arah meskipun alternatif lain mungkin lebih efisien. Konsep ini menekankan bahwa keputusan historis dan pengaturan institusional yang telah mapan

membatasi dan membentuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Pada intinya, keputusan dan struktur awal menciptakan pola yang saling menguatkan yang memengaruhi perkembangan institusional selanjutnya.

- b. *Critical junctures* (titik kritis) adalah momen atau periode tertentu yang mengganggu pola institusional yang ada dan menciptakan peluang untuk perubahan signifikan. Ini merupakan titik-titik penting di mana berbagai pilihan untuk perkembangan institusional menjadi mungkin, dan pilihan yang dibuat selama periode tersebut memiliki dampak jangka panjang. Titik kritis sering terjadi pada masa krisis, pergeseran politik besar, atau ketika tekanan eksternal memaksa peninjauan kembali institusional.
- c. *Institutional layering* (pelapisan institusional) menggambarkan proses di mana elemen-elemen institusional baru ditambahkan berdampingan dengan yang sudah ada, alih-alih menggantikannya secara keseluruhan. Hal ini menciptakan transformasi bertahap ketika aturan, praktik, atau struktur baru diperkenalkan sementara yang lama tetap sebagian utuh. Alih-alih perubahan institusional secara menyeluruh, pelapisan memungkinkan adaptasi bertahap sambil mempertahankan beberapa kesinambungan dengan pengaturan sebelumnya (Thelen, 1999).

Proses pengumpulan dan analisis data mencakup beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya, data yang diperoleh dikategorisasi berdasarkan periode historisnya untuk mempermudah analisis kronologis. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap pola-pola institusional yang muncul dalam data, yang berguna untuk memahami struktur dan dinamika yang ada. Proses ini dilanjutkan dengan identifikasi titik-titik kritis dalam perkembangan institusi, yaitu momen-momen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan atau pergeseran institusional. Akhirnya, mekanisme perubahan institusional dianalisis untuk memahami bagaimana dan mengapa transformasi tersebut terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan sejak masa pra-kolonial hingga era kontemporer. Pada masa awal perkembangannya, pendidikan Islam di Nusantara dimulai melalui jalur perdagangan dan dakwah para pedagang muslim yang datang ke berbagai wilayah kepulauan. Proses pembelajaran pada

masa ini berlangsung secara informal, bertempat di rumah-rumah guru, surau, atau langgar. Pengajaran berfokus pada kemampuan membaca Al-Qur'an dan pemahaman dasar-dasar keislaman (Azyumardi Azra, 1994). Martin Van Bruinessen juga menjelaskan bahwa pada fase ini, pendidikan Islam berlangsung dalam bentuk tradisional melalui pesantren dan surau. Karakteristik utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada kitab kuning dan sistem sorogan (Bruinessen, 1995).

Memasuki periode kolonial Belanda, pendidikan Islam menghadapi tantangan besar ketika pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan Barat. Kebijakan ini menciptakan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang dampaknya masih terasa hingga saat ini (Suminto, 1985). Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, mengambil sikap non-kooperatif terhadap kebijakan pendidikan kolonial dan memilih untuk mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya. Namun, pada awal abad ke-20, muncul gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam (Deliar Noer, 1980).

Fase kemerdekaan membawa angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Terlebih dengan dibentuknya Kementerian Agama pada 1946 menjadi tonggak awal yang menentukan arah perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Fase ini ditandai dengan upaya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional (Mastuhu, 1994). Modernisasi pendidikan Islam ditandai dengan munculnya madrasah-madrasah yang mengadopsi sistem klasikal dan memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya adaptif dari lembaga pendidikan Islam terhadap tuntutan zaman tanpa kehilangan karakteristik keislamannya (Daulay, 2009).

Era Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam landscape pendidikan Islam di Indonesia. Melalui kebijakan modernisasi madrasah, pemerintah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih sistematis. SKB Tiga Menteri tahun 1975 menjadi landasan legal yang memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Periode ini juga ditandai dengan transformasi IAIN menjadi universitas yang lebih komprehensif, mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum (Mastuhu, 1994). Kemudian pada masa reformasi, desentralisasi pendidikan dan UU Sisdiknas 2003 membuka ruang lebih luas bagi pengembangan pendidikan Islam sampai dengan saat ini (Rahim, 2001).

Kementerian Agama sebagai Penanggung Jawab Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI, sejak pembentukannya pada 3 Januari 1946, memainkan peran vital dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), ditjen ini bertanggung jawab secara khusus atas penentuan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA), yang merupakan pendidikan anak usia dini berbasis Islam. Lembaga ini setara dengan Taman Kanak-kanak dan memfokuskan pada pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman sejak dini. Perkembangan RA/BA menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan pendidikan (Rahim, 2001).

Kedua, madrasah. Ia merupakan institusi pendidikan Islam formal di Indonesia yang terdiri dari tiga jenjang: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), masing-masing setara dengan SD, SMP, dan SMA. Transformasi fundamental dalam sistem madrasah terjadi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975, yang diterbitkan oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. SKB ini menjadi tonggak sejarah yang menetapkan kesetaraan status ijazah madrasah dengan sekolah umum yang setingkat (Tilaar, 2000).

Implementasi SKB Tiga Menteri membawa perubahan substansial dalam struktur kurikulum madrasah, dengan pembagian proporsi 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Komposisi ini mencerminkan upaya strategis untuk menciptakan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan umum dan pemahaman nilai-nilai keagamaan. Mata pelajaran umum mencakup matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa, dan mata pelajaran umum lainnya yang setara dengan kurikulum sekolah umum, sementara komponen pendidikan agama meliputi Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab (Steenbrink, 1986).

Perkembangan madrasah saat ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter religius peserta didik, tetapi juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di era modern. Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yang secara

eksplisit mengakui madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Model pendidikan madrasah telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat akan pendidikan modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai religiusitas.

Ketiga, pesantren dan madrasah diniyah merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous Indonesia, terus mengalami dinamika perkembangan di bawah pembinaan Kementerian Agama. Tipologi pesantren berkembang dari model salafiyah (tradisional) hingga pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan formal. Kementerian Agama memberikan pembinaan dan dukungan untuk pengembangan pesantren, termasuk dalam standarisasi kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan (Ziemek, 1986)

Sejalan dengan pesantren, madrasah diniyah juga memegang peranan penting dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, madrasah diniyah diklasifikasikan menjadi tiga jenjang: madrasah diniyah awaliyah (tingkat dasar), madrasah diniyah wustha (tingkat menengah), dan madrasah diniyah ulya (tingkat atas). Kurikulum madrasah diniyah memfokuskan pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Dalam perkembangannya, baik pesantren maupun madrasah diniyah telah mengalami modernisasi dan adaptasi terhadap tuntutan zaman, sambil tetap mempertahankan karakteristik khas pendidikan Islam tradisional. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terus memberikan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kualitas pendidikan di kedua lembaga ini tetap terjaga. Upaya ini mencakup standarisasi kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan sarana prasarana, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Keempat, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal dalam bentuk pengajaran ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, meliputi kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an. Sebagai bagian dari pembinaan Kementerian Agama, LPQ memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan Al-Qur'an di masyarakat. Penyelenggaraan LPQ diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang menegaskan bahwa LPQ dapat berbentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis (Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014). Dalam pelaksanaannya, LPQ wajib mendapatkan izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat dan memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang meliputi isi pendidikan, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan penilaian (Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014, Pasal 46 Ayat (1) Dan Pasal 48, n.d.) .

Kelima, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yang mencakup Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Transformasi beberapa IAIN menjadi UIN menandai perubahan paradigma integrasi ilmu dalam pendidikan tinggi Islam. Pengembangan PTKI tidak hanya fokus pada studi keislaman tradisional tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu modern dengan perspektif Islam (Abdullah, 2017).

Kebijakan-kebijakan tentang Pendidikan Islam di Indonesia

Evolusi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara negara dan pendidikan Islam. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah menjadi landasan awal pengakuan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 yang menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah umum (Usa & Aden Wijdan SZ, 1997).

Titik balik penting terjadi dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tahun 1975, yang mengatur tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Kebijakan ini menjadi fondasi bagi integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional dan mengakui kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum. Implementasi kebijakan ini mengharuskan madrasah mengadopsi kurikulum nasional sambil mempertahankan karakteristik keislamannya (Muhaimin, 2005).

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan legitimasi lebih kuat bagi eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini mengakui madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Pengakuan ini diperkuat lagi melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan kesetaraan pendidikan Islam dengan pendidikan umum (Fadjar, 2005). Pada tahun 2007, dikeluarkan UU No. 18 tentang

Pendidikan Keagamaan, yang memberikan landasan hukum lebih komprehensif bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Islam. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk pendidikan keagamaan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk pengakuan terhadap pesantren sebagai bentuk pendidikan keagamaan (Feisal, 1995).

Analisis Institusionalisme Historis

Pendekatan institusionalisme historis membantu kita memahami dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui beberapa konsep kunci. *Path dependence* terlihat jelas dalam persistensi dikotomi antara pendidikan umum dan agama yang berakar dari kebijakan kolonial. Meskipun berbagai upaya integrasi telah dilakukan, pola pemisahan ini tetap mempengaruhi struktur (Pierson, 2000) dan pengelolaan pendidikan Islam hingga saat ini (Mahoney & Kathleen Thelen, 2010).

Critical junctures dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia dapat diidentifikasi pada beberapa momen penting. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi titik kritis yang menentukan arah pengembangan pendidikan Islam di bawah koordinasi negara. SKB Tiga Menteri 1975 merupakan *critical juncture* lain yang mengubah secara fundamental posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. UU Sisdiknas 2003 menjadi titik kritis berikutnya yang memperkuat legitimasi dan posisi pendidikan Islam (Sven Steinmo, 2008). Momen-momen ini membuka peluang perubahan signifikan dalam struktur pendidikan Islam (Giovanni Capoccia, 2007).

Institutional layering di sini ialah modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan melalui penambahan elemen baru tanpa menghapus struktur lama sepenuhnya. Contohnya adalah transformasi IAIN menjadi UIN, di mana fakultas-fakultas umum ditambahkan tanpa menghilangkan fokus studi keislaman. Pesantren modern juga menunjukkan pola serupa, di mana pendidikan formal diintegrasikan tanpa menghilangkan karakteristik tradisional pesantren (Peters, 2005).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, hasil analisis menunjukkan adanya pola *path dependence* yang kuat dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di mana keputusan-keputusan historis telah membentuk jalur institusional yang relatif stabil dan bertahan hingga saat ini. Kedua, penelitian mengungkapkan bahwa islamisasi pendidikan melalui pendidikan Islam Indonesia lebih

sering terjadi melalui mekanisme *institutional layering* daripada perubahan radikal, menunjukkan kecenderungan adaptasi bertahap dalam sistem pendidikan Islam. Ketiga, studi ini menemukan bahwa *critical junctures* dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi ketika didukung oleh pemangku kebijakan dan masyarakat secara lebih luas

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan keilmuan dalam beberapa aspek penting. Pertama, studi ini berhasil mengembangkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk memahami dinamika perubahan institusional dalam konteks pendidikan Islam. Kerangka ini menawarkan perspektif baru dalam menganalisis transformasi lembaga pendidikan Islam dengan mempertimbangkan faktor-faktor historis dan institusional. Kedua, melalui identifikasi pola-pola historis yang sistematis, penelitian ini memberikan landasan empiris yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif di masa depan.

Lebih lanjut, kontribusi ketiga dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara perubahan institusional dan transformasi sosial dalam konteks pendidikan Islam. Temuan ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan Islam berinteraksi dengan dinamika sosial yang lebih luas, memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan strategi transformasi pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran dalam penelitian ini ialah setelah mengetahui bagaimana pendidikan Islam merupakan upaya Islamisasi pendidikan di Indonesia, maka penelitian selanjutnya dapat dikaji adalah mengenai bagaimana keberhasilannya, baik dikaji secara kualitatif maupun kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (1994). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Mizan.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Bruinessen, M. van. (1995). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat*. Mizan.

- Capoccia, G. (2007). The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism. *World Politics*, 59(3), 341–369.
- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Fadjar, M. (2005). *Holistika pemikiran pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Feisal, J. A. (1995). *Reorientasi pendidikan Islam*. Gema Insani Press.
- Kasman, A. (2024). Landasan spiritual keilmuan dalam pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 65–75. <https://doi.org/10.47498/tadib.v16i1.3009>
- Mahoney, J. (2000). Path dependence in historical sociology. *Theory and Society*, 29(4), 507–548.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (Eds.). (2010). *Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and power*. Cambridge University Press.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika sistem pendidikan pesantren*. INIS.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. Rajawali Pers.
- Nadia, M. F. A. (2022). Islamization of knowledge. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i1.93>
- Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES.
- Nugroho, E. W., & Ramadhan, H. (2022). Islamisasi pengetahuan dan penerapannya pada pendidikan Islam. *Al-Mau'izhoh*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.31949/am.v4i2.4466>
- Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014, Pasal 45 ayat (1) dan (2). (n.d.).
- Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48. (n.d.).
- Peters, B. G. (2005). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. Continuum.
- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.
- Rahim, H. (2001). *Arah baru pendidikan Islam di Indonesia*. Logos.
- Rahman, F. (2015). *Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual*. Pustaka.
- Steenbrink, K. A. (1986). *Pesantren, madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. LP3ES.

- Steinmo, S. (2008). Historical institutionalism. In D. della Porta & M. Keating (Eds.), *Approaches and methodologies in the social sciences* (pp. 150–178). Cambridge University Press.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES.
- Thelen, K. (1999). Historical institutionalism in comparative politics. *Annual Review of Political Science*, 2, 369–404.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Tsani, M. J., & Sauri, S. (2024). Pendidikan Islam: Konsep, masalah, dan solusi. *Educatio*, 19(1), 184–199. <https://doi.org/10.29408/edc.v19i1.26032>
- Usa, M., & Wijdan, A. S. Z. (1997). *Pendidikan Islam dalam peradaban industrial*. Aditya Media.
- Yunus, M. (1996). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren dalam perubahan sosial*. P3M.